

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Chatrina Darul Rosika dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada ; Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Diana Napitupulu, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Fahri Hamzah, *Demokrasi Transisi Korupsi*, Yayasan Faham Indonesia, 2012.
- Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 3003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia; Pasca Reformasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Josef M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Juniver Girsang, *Abuse Of Power*, JG Publising, Jakarta 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha pemberantasan Korupsi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.

- Kuntadi, *SIKENCUR Sistem Kendali Kecurangan Menata Birokrasi Bebas Korupsi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Mempelajari Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*, Jakarta, 2003.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2010.
- Robert Kligaard dkk., *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002.
- Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum & Politik Dalam Negara Demokrasi*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2016.

## **B. Jurnal**

- Arfan Datukramat, *Penegakan Hukum Oleh Kpk Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Dalam Jurnal Hukum, Vol. II/No. 6/Oktober/2013.

DPR RI, *Majalah Parleментарia*, Edisi 151 TH. XLVII 2017.

Endarto, *Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, jurnal hukum, Edisi 1 No. 3, Juli – September 2014

Gunawan A. Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 6, No 2 Juli 2011.

### **C. Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (UU KPI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **D. Data Elektronik**

<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2017, pukul 14.00 WIB.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14286#Wuaw2DUqvIU>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB

<https://hukum.tempo.co/read/1060137/setelah-mahkamah-konstitusi-menyatakan-kpk-bagian-dari-eksekutif>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/3559954/kpk-bagian-eksekutif-atau-yudikatif-ini-jawaban-mk>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/olivia/56880fe8d57e615f0b67478f/evaluasi-tindakan-strategi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2017, Pukul 15.00 WIB.